

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala yang telah dilaksanakan selama 5 minggu dari 7 April hingga 10 Mei 2025 dapat disimpulkan:

1. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Apoteker harus bisa merekomendasikan terapi yang tepat untuk pasien swamedikasi, mampu melakukan *compounding*, dispensing dan KIE kepada pasien.
3. Apoteker harus memiliki keterampilan manajemen apotek yang baik dalam merencanakan, mengadakan, melakukan penerimaan, penyimpanan serta mendistribusikan sediaan farmasi.
4. Apoteker bertanggung jawab terhadap pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor dan obat-obat tertentu.

#### **5.2 Saran**

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala, saran yang dapat diberikan kepada calon apoteker adalah:

1. Memiliki pengetahuan mengenai penyakit umum yang ada di masyarakat dan terapi pengobatannya.
2. Harus berani dan percaya diri dalam merekomendasikan obat pada pasien swamedikasi berdasarkan hasil penggalian informasi.
3. Mengamati dan mempelajari bagaimana manajemen operasional yang ada di apotek agar pelayanan dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNF. 2023, BNF 85 March-September 2023. BMJ Publishing Group and Pharmaceutical Press, London.
- BNFC. 2023, BNF for Children September 2022—2023. BMJ Publishing Group and Pharmaceutical Press, London.
- BPOM. 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Jakarta.
- Brayfield, A. 2014, *Martindale The Complete Drug Reference 38<sup>th</sup> Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Derwich, M., Górski, B., Amm, E., & Pawłowska, E. 2023. Oral glucosamine in the treatment of temporomandibular joint osteoarthritis: a systematic review. *International journal of molecular sciences*, 24(5), 4925.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan dan Kategori Obat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/997/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024, Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- McEvory, G.K. 2011, AHFS Drug Information Essentials. American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda.
- Presiden Republik Indonesia. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta.